



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGID MULYADI
2. Jabatan : KEPALA KPPN TANJUNG
3. NHK : 891687

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.524.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/126 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 352.000.000
2. Tanah Seluas 79 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 176.000.000
3. Tanah Seluas 902 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
4. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 402.000.000
5. Tanah Seluas 2049 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 201.000.000
6. Tanah Seluas 6220 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 805.000.000
7. Tanah Seluas 1021 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000
8. Tanah Seluas 485 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000
9. Tanah Seluas 2206 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 301.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **208.000.000**



1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
57.000.000
2. MOBIL, SUZUKI NEW BALENO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	48.280.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	144.775.920
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.925.555.920
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.925.555.920

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.